

Editorial

Mengubah Bukti Menjadi Tindakan: Peran Penelitian dalam Membentuk Kebijakan

Turning Evidence into Action: The Role of Research in Shaping Policy

M. Agung Akbar^{1,2*}

¹ Program Studi D-III Keperawatan, STIKes Al-Ma'arif Baturaja

² Science Center Group, Indonesia

***Corresponding author:**

M. Agung Akbar

Program Studi D-III Keperawatan,

STIKes Al-Ma'arif Baturaja

Email: magungakbar24@gmail.com

© The Author(s) 2024

E ISSN : [3089-1590](https://doi.org/10.3089/1590)



This is an Open Access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

N/A

Keyword

Evidence-Based Policy; Collaboration; Communication; Crisis Response; Funding

Abstrak

N/A.

Kata Kunci

Kebijakan Berbasis Bukti; Kolaborasi; Komunikasi; Tanggap Krisis; Pendanaan

Kebijakan publik berbasis bukti memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketimpangan pendidikan. Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) memungkinkan terciptanya solusi yang lebih tepat dan relevan dengan realitas yang ada. Namun, meskipun nilai pentingnya sudah diakui, banyak tantangan yang masih menghadang upaya untuk menerjemahkan penelitian ilmiah ke dalam kebijakan yang efektif dan berdampak nyata. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara ilmuwan dan pembuat kebijakan, yang seringkali menghambat pengintegrasian penelitian dalam proses pengambilan keputusan public (Prasinos et al., 2022).

Hambatan ini terutama muncul karena perbedaan bahasa, prioritas, dan metode kerja antara kedua pihak. Sementara ilmuwan fokus pada detail metodologis dan temuan empiris yang seringkali membutuhkan waktu, pembuat kebijakan di sisi lain memerlukan solusi yang cepat, adaptif, dan dapat diterapkan dalam kondisi yang kompleks. Pentingnya komunikasi yang efektif untuk menjembatani kedua belah

pihak. Para ilmuwan diharapkan mampu menyederhanakan temuan-temuan mereka agar lebih mudah dipahami tanpa mengurangi esensi ilmiah, sedangkan pembuat kebijakan perlu terbuka terhadap data dan pendekatan baru yang mungkin menantang pemikiran konvensional. Kolaborasi ini akan memperkuat relevansi dan kualitas kebijakan (Malin & Fortunato, 2022).

Lebih lanjut, pemerintah dan institusi riset harus secara proaktif mengembangkan mekanisme kolaborasi yang strategis untuk menjamin sinergi ini. Salah satu pendekatan yang efektif adalah membangun kerjasama formal melalui pembentukan pusat-pusat penelitian kebijakan yang berfungsi sebagai perantara. Pusat-pusat ini dapat menjadi jembatan antara dunia akademis dan pemerintahan, menciptakan ruang diskusi yang produktif untuk membahas bagaimana penelitian dapat diterapkan dalam konteks kebijakan. Hasil-hasil penelitian diharapkan akan lebih relevan dan siap diimplementasikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan antara kedua pihak dalam upaya memajukan kebijakan publik.

Tantangan untuk merespons temuan riset dengan cepat juga menjadi kunci, terutama dalam situasi krisis. Pandemi COVID-19, misalnya, menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang cepat, berbasis data, dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Kerjasama erat antara ilmuwan dan pembuat kebijakan sangat diperlukan untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Sebagai contoh, penelitian tentang penyebaran virus dan efektivitas vaksin mampu memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan protokol kesehatan dan vaksinasi yang mana pada akhirnya membantu mengendalikan pandemi. Dengan demikian, respons yang cepat berdasarkan riset menjadi faktor esensial dalam mengatasi krisis global (Zadey, Dharmadhikari, & Mukuntharaj, 2021).

Namun demikian, untuk mencapai hasil optimal maka riset yang dilakukan harus diarahkan pada isu-isu yang paling relevan bagi masyarakat. Penelitian yang hanya mengikuti tren tanpa memperhatikan kebutuhan mendasar berisiko mengabaikan isu strategis yang sebenarnya lebih mendesak. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Hal ini menjadi pengingat bagi komunitas riset untuk lebih proaktif dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar mengikuti perkembangan wacana ilmiah global (Marson, 2022).

Selain itu, dukungan finansial dan sumber daya juga menjadi aspek krusial untuk mendorong implementasi kebijakan berbasis bukti. Tanpa alokasi dana yang memadai maka penelitian yang berpotensi membawa perubahan positif dalam kebijakan publik sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, institusi riset dan pemerintah perlu memberikan prioritas dalam penganggaran untuk penelitian yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan kebijakan publik. Dengan dukungan finansial yang memadai, penelitian yang lebih aplikatif dan berdampak dapat terlaksana, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Messing, Tcymbal, Abu-Omar, & Gelius, 2023).

Sinergi antara riset dan kebijakan semakin dibutuhkan. Penelitian yang terarah dan kebijakan berbasis bukti akan membantu pemerintah menghadapi berbagai permasalahan yang dinamis. Kebijakan yang disusun dengan dasar data dan temuan yang valid memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, serta mendorong pembaharuan dan inovasi yang berkelanjutan. Kesadaran ini juga perlu meluas di kalangan akademisi untuk memastikan bahwa penelitian mereka memiliki aplikasi praktis yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Figueroa & Verma, 2023).

Secara keseluruhan, konsep “Driven Research into Policy” sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang responsif, relevan, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat antara ilmuwan dan pembuat kebijakan, kebijakan publik tidak hanya dapat berfungsi sebagai solusi sementara, tetapi juga sebagai dasar untuk pembangunan yang kokoh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di masa depan.

References

- Figueroa, R., & Verma, R. (2023). Constituent-driven health policy informed by policy advocacy literature. *Transl Behav Med*, 13(5), 338-342. doi:10.1093/tbm/ibac116
- Malin, J. L., & Fortunato, C. (2022). Leveraging Research Synthesis Methods to Support Evidence-Based Policy- and Decision-Making. *Prev Sci*, 23(3), 472-475. doi:10.1007/s11121-022-01339-7
- Marson, T. (2022). Evidence-based policy for driving: easier said than done. *Pract Neurol*, 22(4), 266-267. doi:10.1136/practneurol-2022-003458
- Messing, S., Tcymbal, A., Abu-Omar, K., & Gelius, P. (2023). Research- vs. government-driven physical activity policy monitoring: a systematic review across different levels of government. *Health Res Policy Syst*, 21(1), 124. doi:10.1186/s12961-023-01068-5
- Prasinos, M., Basdekis, I., Anisetti, M., Spanoudakis, G., Koutsouris, D., & Damiani, E. (2022). A Modelling Framework for Evidence-Based Public Health Policy Making. *IEEE J Biomed*

Health Inform, 26(5), 2388-2399.
doi:10.1109/jbhi.2022.3142503

Zadey, S., Dharmadhikari, S., & Mukuntharaj, P.
(2021). Ethics-driven policy framework for
implementation of movement restrictions in
pandemics. *BMJ Glob Health*, 6(6).
doi:10.1136/bmjgh-2021-005202